

## ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN STUDI SEKTOR UNGGULAN DI KABUPATEN/KOTA SE- JAWA TENGAH

Oleh :

Hastarini Dwi Atmanti

Fakultas Ekonomi UNDIP Semarang

E-mail : hastarini\_dwi\_atmanti@yahoo.com

### *Abstract*

*Economic growth is an indicator of economic achievement, especially for economics. This indicator is important for region because can be used for evaluation of development achievement and for basis of planning and policy for the future. In the development procces, Province Central Java divide its region into three of parts which is called by Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/kota (Bakorlin).*

*Keyword: growth, development, Central Java, Bakorlin*

### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat menjadi meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga berkembang. Di samping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring pengalaman kerja dan pendidikan menambah ketrampilan mereka. Dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara (Sadono Sukirno, 1985).

Kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah haruslah menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pembangunan. Isu kesenjangan perekonomian dan distribusi pendapatan antar daerah berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan harmonisasi sosial. Dengan tingkat pendapatan tertentu, kenaikan kesenjangan akan selalu

berimplikasi pada kenaikan kemiskinan dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah.

Dalam melaksanakan proses pembangunan, Propinsi Jawa Tengah membagi wilayahnya ke dalam tiga Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/kota (Bakorlin) (Perda Jateng No. 8 tahun 2001). Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten / kota atau disingkat BAKORLIN adalah suatu lembaga teknis daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi. BAKORLIN dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun 3 (tiga) BAKORLIN di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- BAKORLIN I. Dengan pusat di Pati. Bakorlin I meliputi Kab. Blora, Kab. Demak, Kab. Grobogan, Kab. Jepara, Kab. Kendal, Kab. Kudus, Kab. Pati, Kab. Rembang, Kab. Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.
- BAKORLIN II, dengan pusat di Magelang dan meliputi wilayah Kab. Boyolali, Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kota Magelang, Kab. Kebumen, Kab. Sukoharjo, Kota Surakarta, Kab. Klaten, Kab. Temanggung, Kab. Magelang, Kab. Wonogiri.
- BAKORLIN III, dengan pusat di Purwokerto yang meliputi 9 kabupaten dan 2 kota, yaitu : Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Cilacap, Kab. Banjarnegara, Kab. Batang, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kab. Brebes, Kota Pekalongan, Kota Tegal.

Selama 5 tahun (2001-2005), rata-rata pertumbuhan tiap kabupaten/kota (pada masing-masing Bakorlin) berada di bawah 5 %. Laju pertumbuhan yang cukup merata adalah di kabupaten/kota di wilayah Bakorlin II, sedangkan kabupaten/kota di wilayah Bakorlin I dan III terdapat varians laju pertumbuhan. Hal itu berarti masih terdapat kesenjangan pendapatan yang ditunjang oleh perbedaan potensi antar daerah yang dimiliki baik potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia maupun infrastruktur yang ada. Dengan perbedaan potensi daerah tersebut, kesenjangan antar daerah juga semakin besar, baik kesenjangan dalam pertumbuhan ekonomi, investasi dan Pendapatan Asli Daerah. Demikian juga masih terdapat kesenjangan non ekonomi lainnya seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, birokrasi dan jasa-jasa lainnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang tersebut, maka masalah yang dihadapi oleh kabupaten/kota di masing-masing BAKORLIN di Jawa Tengah adalah masih rendahnya pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di masing-masing BAKORLIN di Jawa Tengah.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :



dibutuhkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan ini tidak mengeksport barang-barang jadi, luas-lingkup produksi mereka dan daerah pasar mereka yang terutama adalah bersifat lokal. (Glasson, 1990).

### E. Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain (Hermawan Wasito, 1995). Dalam hal ini data diambil dari BPS Jawa Tengah dari tahun 2002-2006. Analisis data yang digunakan untuk memecahkan masalah dan memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah:

#### Analisis *Location Quotient* (LQ)

Analisis LQ merupakan suatu alat analisis untuk menunjukkan basis ekonomi wilayah terutama dari kriteria kontribusi. Variabel yang digunakan dalam perhitungan basis ekonomi tersebut adalah PDRB daerah kabupaten/kota dari suatu sektor yang dititikberatkan pada struktur ekonomi daerah. Menurut Isard (1972), variabel yang dapat digunakan dalam analisis LQ adalah tenaga kerja, nilai tambah, jumlah penduduk, luas lahan, produksi dan pendapatan regional (PDRB). Adapun rumus *Location Quotient* (LQ) adalah :

$$LQ = \frac{(PDRB_{ij} / PDRB_{in})}{(TPDRB_j / TPDRB_n)}$$

$PDRB_{ij}$	= PDRB sektor i di kabupaten/kota j
$PDRB_{in}$	= PDRB sektor i di propinsi Jawa Tengah
$TPDRB_j$	= total PDRB di kabupaten/kota j
$TPDRB_n$	= total PDRB di propinsi Jawa Tengah

#### Analisis *Shift-Share*

Analisis *shift share* (Rachmad Hendayana, 2007) digunakan untuk mengetahui perubahan struktur/kinerja ekonomi daerah terhadap struktur ekonomi yang lebih tinggi yaitu provinsi atau nasional sebagai referensi. Hubungan antara komponen dalam *shift share* adalah :

$$\Delta E_r = E_{r,t} - E_{r,t-n}$$

Artinya : pertambahan lapangan kerja (output) regional adalah banyaknya lapangan kerja (output) pada tahun akhir (t) dikurangi dengan jumlah lapangan kerja (output) pada tahun awal (t-n). Sedangkan untuk dapat melihat per sektor adalah :

$$\Delta E_{r,i} = E_{r,i,t} - E_{r,i,t-n}$$

Artinya : pertambahan lapangan kerja (output) regional sektor i adalah jumlah lapangan kerja (output) sektor i pada tahun akhir (t) dikurangi dengan lapangan kerja (output) sektor i pada tahun awal (t-n). Pertumbuhan lapangan

kerja regional sektor  $i$  ini dapat diperinci atas pengaruh dari National share, Proportional share dan differential shift.

$$\Delta E_{r,i} = (NS_i + P_{r,i} + D_{r,i})$$

Peranan National share ( $NS_i$ ) adalah seandainya pertambahan lapangan kerja (output) regional sektor  $i$  tersebut sama dengan proporsi pertambahan lapangan kerja (output) nasional secara rata-rata.

$$NS_{i,t} = E_{r,i,t-n} (E_{N,t} / E_{N,t-n}) - E_{r,i,t-n}$$

Proportional share ( $P_{r,i}$ ) adalah melihat pengaruh sector  $i$  secara nasional terhadap pertumbuhan lapangan kerja (output) sector  $i$  pada region yang dianalisis.

$$P_{r,i,t} = \{(E_{N,i,t} / E_{N,i,t-n}) - (E_{N,t} / E_{N,t-n})\} \times E_{r,i,t-n}$$

Differential shift ( $D_{r,i}$ ) adalah menggambarkan penyimpangan antara pertumbuhan sector  $i$  di wilayah analisis terhadap pertumbuhan sector  $i$  secara nasional.

$$D_{r,i,t} = \{E_{r,i,t} - (E_{N,i,t} / E_{N,i,t-n})\} \times E_{r,i,t-n}$$

Sehingga persamaan untuk seluruh wilayah adalah

$$E_r = NS + Pr + Dr$$

di mana :

$$NS_t = \sum_{i=1}^n \{E_{r,i,t-n} (E_{N,t} / E_{N,t-n}) - E_{r,i,t-n}\}$$

$$P_{r,t} = \sum_{i=1}^n \{[(E_{rN,i,t} / E_{N,i,t-n}) - (E_{N,t} / E_{N,t-n})] \times E_{r,i,t-n}\}$$

$$D_{r,t} = \sum_{i=1}^n \{[E_{r,i,t} - (E_{N,i,t} / E_{N,i,t-n}) - E_{r,i,t-n}]\}$$

### Analisis Model Rasio Pertumbuhan

Analisis MRP dilakukan untuk melihat deskripsi sektor ekonomi terutama struktur ekonomi daerah yang menekankan pada kriteria pertumbuhan baik eksternal (kabupaten/kota) maupun internal (wilayah studi yang lebih kecil) (Yusuf, 1999). Pendekatan MRP dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

#### 1. Rasio pertumbuhan wilayah referensi (RPR)

Dalam hal ini RPR membandingkan pertumbuhan masing-masing sektor dalam konteks propinsi Jawa Tengah dengan PDRB kabupaten/kota.



$$\text{Rumus RPR : } \frac{\Delta E_i R / E_i R}{\Delta ER / ER}$$

$\Delta E_i R$  = perubahan PDRB sektor i di wilayah referensi.

$\Delta ER$  = perubahan PDRB di wilayah referensi.

$E_i R$  = PDRB sektor i di wilayah referensi

$ER$  = PDRB di wilayah referensi

## 2. Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPS)

Dalam hal ini RPS membandingkan pertumbuhan masing-masing sektor dalam konteks kabupaten/kota dengan pertumbuhan sektor propinsi Jawa Tengah.

$$\text{Rumus RPS : } \frac{\Delta E_i J / E_i J}{\Delta E_j J / E_j J}$$

$\Delta E_i J$  = perubahan PDRB sektor i di wilayah studi

$\Delta E_j J$  = perubahan PDRB di wilayah studi

$E_i J$  = PDRB sektor i di wilayah studi

$E_j J$  = PDRB di wilayah studi

## Analisis Overlay

Analisis Overlay merupakan penggabungan atau penampilan lebih dari satu alat analisis dengan tujuan untuk menyaring hasil analisis yang paling baik, dimana hasil akhir dapat merupakan beberapa kemungkinan ataupun hanya merupakan hasil yang diinginkan saja (Mikhail, 1991). Analisis Overlay dalam penelitian ini merupakan rangkuman antara analisis Location Quotient (LQ) dan analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP).

## Analisis Elastisitas dan Multiplier PDRB Terhadap Sektor Ekonomi

Adalah alat analisis untuk menghitung seberapa elastis pertumbuhan PDRB jika output suatu sektor meningkat. Dengan kata lain, analisis ini menghitung kepekaan PDRB terhadap suatu sektor (Bilas, 1992). Secara matematis, elastisitas PDRB dapat ditulis sebagai berikut :

$$E(X)_t = \left\{ \frac{\left[ \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \right]}{\left[ \frac{Q(X)_t - Q(X)_{t-1}}{Q(X)_{t-1}} \right]} \right\}$$

Dimana,

$E(X)_t$  = tingkat kepekaan PDRB terhadap perubahan sektor X pada tahun t

- $Q(X)_t$  = output sektor X pada tahun t  
 $PDRB_t$  = PDRB pada tahun t  
 $Q(X)_{t-1}$  = output sektor X pada tahun t-1  
 $PDRB_{t-1}$  = PDRB pada tahun t-1

Sedangkan multiplier dari suatu sektor dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Multiplier sektor } X_t = \left[ \frac{Q(X)_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \right] E(X)_t$$

### Analisis Regresi Sederhana

Digunakan untuk mengetahui pengaruh antara perkembangan kontribusi sektor unggulan di propinsi Jawa Tengah terhadap pembentukan PDRB Jawa Tengah dengan ketimpangan pertumbuhan ekonomi. Dari hasil perhitungan Indeks Williamson dan Indikator Kesenjangan Relatif, maka didapatkan besarnya ketimpangan yang terjadi di Jawa Tengah. Dari sini selanjutnya dilakukan analisis regresi sederhana (*simple regression*) yang dirumuskan sebagai berikut :

1.  $Y_1 = a_1 + b_1 X_1$
2.  $Y_2 = a_2 + b_2 X_2$

Dimana :

$$b = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} \quad \text{atau} \quad b = \frac{n \sum X_i Y_i - \sum X_i \sum Y_i}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2} \quad \text{dan} \quad a = \bar{Y} - b \bar{X}$$

Dimana :

- $Y_1$  = Indeks Wiliamson  
 $a_1$  = konstanta regresi pertama  
 $b_1$  = koefisien regresi pertama  
 $X_1$  = kontribusi sektor unggulan terhadap pembentukan PDRB  
 $Y_2$  = Indeks Kesenjangan Relatif  
 $a_2$  = konstanta regresi kedua  
 $b_2$  = koefisien regresi kedua  
 $X_2$  = kontribusi sektor unggulan terhadap pembentukan PDRB

### Indeks Williamson

Indeks Williamson (Vw) adalah koefisien bobot dan variasi yang mengukur dispersi dari pendapatan wilayah perkapita relatif terhadap rata-rata wilayah yang lebih besar, dimana setiap deviasi ditentukan bobotnya berdasarkan populasi daerah tersebut terhadap populasi wilayah yang lebih besar. Indeks Williamson adalah Indeks yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antar wilayah. Semakin tinggi nilai Vw, semakin besar ukuran tingkat pendapatan (Hendra Esmara, 1975).

Adapun Indeks Williamson dirumuskan sebagai berikut :



$$\text{Rumus : } V_w = \frac{\sqrt{\sum i(Y_i - Y)^2 \cdot \frac{f_i}{n}}}{Y}$$

Keterangan :

- $V_w$  : indeks Williamson  
 $f_i$  : jumlah penduduk di masing-masing wilayah kabupaten/kota  
 $n$  : jumlah penduduk di Propinsi Jawa Tengah  
 $Y_i$  : PDRB di masing-masing wilayah kabupaten/kota  
 $Y$  : PDRB di Propinsi Jawa Tengah

### Indikator Kesenjangan Relatif

Indeks Williamson ternyata hanya dapat melihat ada tidaknya pemerataan pendapatan di wilayah propinsi Jawa Tengah secara global atau keseluruhan. Oleh karena itu dalam analisis ini perlu disertai juga dengan indikator yang disebut dengan Indikator Kesenjangan Relatif (*Relative Inequality*) yang diartikan sebagai ketimpangan dalam penerimaan pendapatan yang diterima oleh kabupaten/kota yang ada di propinsi Jawa Tengah. Dengan indikator ini akan diketahui seberapa besar bagian yang diterima oleh kabupaten/kota yang berpendapatan terendah.

## F. Analisis dan Pembahasan

### Analisis Location Quotient

Untuk menunjukkan basis ekonomi suatu wilayah dapat digunakan analisis *Location Quotient* (LQ). LQ adalah suatu teknik perhitungan yang mudah untuk menunjukkan spesialisasi relatif (kemampuan) wilayah/daerah dalam sektor atau karakteristik tertentu.

#### *Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin) I*

Mayoritas Kabupaten/Kota di Bakorlin I mempunyai sektor unggulan pada sektor pertanian. Selama periode penelitian Kabupaten Kendal, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak merupakan wilayah-wilayah yang masih mengandalkan sektor pertanian sebagai sektor unggulan. Dibalik itu semua, terdapat juga wilayah yang tidak bergantung pada sektor pertanian sebagai sektor unggulan. Adapun wilayah tersebut antara lain Kabupaten Kudus, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kota Semarang.

Perekonomian Bakorlin I Jawa Tengah selama kurun waktu 2002-2006 memiliki variasi yang cukup beragam. Pada kurun waktu tersebut, Kabupaten Kendal memiliki sektor unggulan meliputi sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air bersih. Namun, pada tahun 2006 sektor pertanian tidak lagi menjadi sektor unggulan, ini dapat dilihat dari nilai LQ sektor tersebut yang kurang dari 1. Selain sektor-sektor tersebut masih terdapat

beberapa sektor yang dapat dikembangkan menjadi sektor unggulan antara lain sektor pertambangan dan penggalan serta sektor perdagangan dan hotel yang memiliki nilai LQ mendekati 1 dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang memiliki nilai LQ lebih besar dari 0,5 dan memiliki kecenderungan semakin meningkat.



***Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin) II***

Selama kurun waktu 2002-2006, di Bakorlin II terdapat beberapa sektor yang cukup mendominasi di sebagian besar wilayah kabupaten/kota. Sektor-sektor tersebut diantaranya sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan di sembilan wilayah kabupaten/kota, sektor pengangkutan dan komunikasi yang merupakan sektor unggulan di tujuh wilayah kabupaten/kota, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang merupakan sektor unggulan di sepuluh wilayah kabupaten/kota, serta sektor jasa yang merupakan sektor unggulan di sembilan wilayah kabupaten/kota.

Terlepas dari empat sektor unggulan yang disebutkan di atas, di setiap wilayah kabupaten/kota masih memiliki sektor-sektor unggulan lain dan berperan cukup penting pada perekonomian di wilayahnya masing-masing. Sektor-sektor unggulan tersebut meliputi sektor pertambangan dan penggalian dan sektor kontruksi/bangunan di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang, sektor perdagangan, hotel dan restoran di Kabupaten Boyolali, sektor kontruksi/bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran di Kabupaten Klaten, sektor perdagangan, sektor pertambangan dan penggalian dan hotel dan restoran di Kabupaten Sukoharjo, sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Karanganyar, sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Kebumen, sektor pertambangan dan penggalian dan sektor kontruksi/bangunan di Kabupaten Temanggung, serta sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor kontruksi/bangunan di Kota Magelang dan Kota Surakarta.

***Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin) III***

Dominasi sektor pertanian sebagai sektor unggulan tidak terjadi pada Bakorlin III. Dengan pusat di Purwokerto yang meliputi 9 kabupaten dan 2 kota, wilayah di Bakorlin III sebagian besar ditopang lebih dari tiga sektor unggulan. Wilayah di Bakorlin III yang ditopang kurang dari sama dengan dua sektor unggulan yaitu Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes. Dibalik itu semua, perekonomian dua wilayah tersebut cenderung meningkat. Ini dapat dilihat dari semakin bertambahnya sektor unggulan seiring pembangunan ekonomi yang dilakukan dari tahun ke tahun. Buktinya adalah pada tahun 2006 Kabupaten Cilacap telah memiliki tiga sektor unggulan yang sebelumnya hanya dua sektor unggulan dan Kabupaten Brebes telah memiliki empat sektor unggulan yang sebelumnya hanya dua sampai tiga sektor saja. Secara umum sektor yang menjadi sektor unggulan di Bakorlin III adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi atau bangunan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa.

***Analisis Shift Share***

Untuk mengetahui perubahan struktur/kinerja ekonomi daerah terhadap struktur ekonomi yang lebih tinggi dapat menggunakan analisis *shift share*. Analisis *shift share* dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui perubahan



struktur/kinerja ekonomi wilayah Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin) terhadap struktur ekonomi nasional (provinsi).

### ***Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin) I***

Dengan melihat hasil perhitungan *national share* dapat diketahui bahwa semua kabupaten/kota di Bakorlin I mempunyai kontribusi positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Pangsa perekonomian Bakorlin I yang memiliki *share* terbesar adalah Kabupaten Pati dan diikuti oleh Kabupaten Kendal dengan masing-masing nilai rasio *national share* sebesar 337,51% dan 302,97%, sedangkan wilayah yang menyumbangkan *share* terkecil yaitu Kabupaten Kudus dengan nilai rasio *share* hanya sebesar 160,33%. Nilai NS yang positif mengindikasikan bahwa pertumbuhan di Bakorlin I lebih cepat dari rata-rata pertumbuhan nasional.

Selanjutnya dengan memperhatikan komponen pergeseran, sebagian besar wilayah di Bakorlin I memiliki nilai *proportional share* yang positif kecuali Kabupaten Kudus, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kota Semarang. *Proportional share* yang bernilai negatif menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut berspesialisasi pada sektor industri yang secara lingkup Provinsi Jawa Tengah tergolong lambat. Dibalik laju pertumbuhan spesialisasi di sebagian besar kabupaten/kota di Bakorlin I yang tergolong cepat, ternyata wilayah-wilayah tersebut tidak memiliki keuntungan lokasional yang disebabkan oleh tidak memiliki sumber daya yang melimpah/efisien.

### ***Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin) II***

Kontribusi yang positif terhadap PDRB juga dimiliki oleh kabupaten/kota di Bakorlin II. Ini ditunjukkan dengan nilai *national share* seluruh kabupaten/kota di Bakorlin II memiliki nilai yang positif. Spesialisasi pada sektor yang secara nasional tumbuh cepat ditunjukkan oleh sebagian besar kabupaten/kota di Bakorlin II. Dengan melihat nilai PS, hanya terdapat 4 kabupaten/kota saja yang memiliki nilai PS yang negatif, yaitu Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kota Magelang dan Kota Surakarta. Hasil perhitungan juga menunjukkan tidak ada satupun wilayah di Bakorlin II yang tidak mempunyai keuntungan lokasional. Dengan kata lain seluruh kabupaten/kota di Bakorlin II tidak memiliki sumber daya yang melimpah atau efisien.

### ***Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin) III***

Untuk wilayah Bakorlin III, hasil dari analisis *shift share* secara umum tidak jauh berbeda dengan dua wilayah Bakorlin sebelumnya. Kesamaan kondisi umum tergambarkan pada nilai NS yang mana seluruh kabupaten/kota di Bakorlin III memiliki nilai NS yang positif. Nilai PS yang negatif terjadi di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Ini mengindikasikan bahwa keempat daerah tersebut berspesialisasi pada sektor-sektor yang secara nasional tumbuh dengan lambat atau bahkan mungkin sedang merosot. Kondisi daerah yang tidak memiliki keuntungan lokasional seperti di



Bakorlin I dan Bakorlin II juga terjadi di bakorlin III. Dari 11 kabupaten/kota yang ada di Bakorlin III, semuanya memiliki nilai DS yang negatif.

### **Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)**

Analisis Model Rasio Pertumbuhan dilakukan untuk melihat persepsi sektor ekonomi terutama struktur ekonomi daerah yang menekankan pada kriteria pertumbuhan baik eksternal (wilayah referensi) maupun internal (wilayah studi yang lebih kecil). Dengan model ini maka dapat diketahui sektor – sektor ekonomi yang merupakan dominan pertumbuhan dan potensial pertumbuhan.

#### ***Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin) I***

Kriteria pertumbuhan pada Bakorlin I mengindikasikan kondisi yang berbeda-beda untuk masing-masing kabupaten/kota. Akan tetapi, kebanyakan mempunyai sektor dominan pertumbuhan dan sektor potensial, terkecuali Kabupaten Blora yang tidak mempunyai sektor dominan dan potensial. Kabupaten Grobogan, Demak dan Kendal juga tidak mempunyai sektor yang dominan dalam pertumbuhan. Lebih lanjut, kabupaten /kota yang tidak mempunyai sektor potensial pertumbuhan adalah Blora dan Kota Semarang.

Secara keseluruhan (rata-rata), setiap kabupaten/kota di Bakorlin I sektor dominannya terdiri atas sektor pertambangan, bangunan, pengangkutan, jasa, dan listrik. Di sisi yang lainnya sektor keuangan, perdagangan, hotel, industri pengolahan, dan juga pengangkutan merupakan sektor yang masuk dalam kriteria potensial pertumbuhan di kabupaten /kota pada Bakorlin I.

Dalam menginterpretasi hasil analisis ini diperlukan kehati-hatian dan perlu pemahaman yang lebih mendalam tentang sektor yang dikaji. Sektor pertanian sebagai contohnya, hampir keseluruhan kabupaten/kota tidak terdapat sektor pertanian sebagai sektor dominan dan potensial pertumbuhan. Hal ini tentunya dapat dipahami karena laju perubahan output sektor pertanian dari tahun ke tahun memang lebih kecil dibandingkan dengan sektor lainnya.

#### ***Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin) II***

Sesuai dengan hasil perhitungan menunjukkan bahwa dari 13 (Tiga belas) kabupaten/kota di Bakorlin II hanya ada 5 (Lima) Kabupaten yang memiliki sektor dominan dalam pertumbuhan yaitu Kabupaten Purworejo, Magelang, Boyolali, Klaten dan Sragen. Sektor sektor yang masuk kategori dominan pertumbuhan antara lain pengangkutan, listrik, bangunan, jasa, dan pertambangan.

Dilain pihak, kabupaten/kota di Bakorlin II mempunyai sektor potensial pertumbuhan, diantaranya Kabupaten Purworejo, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Kota Magelang dan Kota Surakarta. Sektor yang potensial pada kabupaten /kota tersebut adalah Industri pengolahan, keuangan, dan perdagangan.

1. Menganalisis pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di masing-masing BAKORLIN di Jawa Tengah.
2. Menganalisis sektor unggulan di wilayah kabupaten/kota di masing-masing BAKORLIN di Jawa Tengah.

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Sebagai masukan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kinerja ekonomi wilayah, sehingga di tiap daerah administratif (kecamatan, desa/kelurahan) dapat ditingkatkan potensinya.
2. Dari hasil penelitian ini, apabila terdapat daerah yang kurang unggul tetapi mempunyai potensi, maka daerah tersebut dapat menjadi daerah binaan, sehingga penelitian ini berkelanjutan.

#### D. Landasan Teori

##### Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan Ekonomi menurut Sadono Sukirno (1985) adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Adapun pertumbuhan ekonomi menurut Boediono (1995) adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

##### Model Pertumbuhan

Model pertumbuhan Solow telah menjadi kerangka dasar yang penting bagi banyak penelitian tentang pertumbuhan selama ini. Manfaat penggunaan model pertumbuhan Solow adalah untuk mengklarifikasi tentang bagaimana akumulasi kapital dan pertumbuhan ekonomi saling berinteraksi satu dengan lainnya. Singkatnya, model pertumbuhan ekonomi dari Solow tersebut berusaha untuk menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi itu terjadi sepanjang waktu. (Muana Nanga, 2001).

##### Teori Basis Ekonomi

Perekonomian regional dibagi menjadi dua sektor yaitu kegiatan basis (*basic activities*) dan kegiatan bukan basis (*non-basis activities*). Kegiatan basis adalah kegiatan yang mengeksport barang-barang dan jasa-jasa ke tempat-tempat di luar batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan, atau yang memasarkan barang-barang dan jasa-jasa mereka kepada orang-orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan bukan basis adalah kegiatan yang menyediakan barang-barang yang



***Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin) III***

Bakorlin III yang berpusat di Purwokerto ini mempunyai karakteristik yang tidak jauh berbeda Bakorlin I dimana hampir seluruh kabupaten/kota mempunyai sektor yang masuk kedalam kriteria dominan pertumbuhan dan potensial pertumbuhan. Satu-satunya kabupaten yang tidak mempunyai sektor dominan dan potensial pertumbuhan adalah Kabupaten Banjarnegara.

Pada Bakorlin yang berpusat di Purwokerto ini, sektor yang menjadi dominan pertumbuhan adalah sektor pengangkutan, listrik dan pertambangan. Sedangkan sektor potensial pertumbuhan yaitu industri pengolahan, perdagangan, dan keuangan.

**Analisis Overlay**

Analisis Overlay dalam pembahasan ini adalah menggabungkan antar analisis Location Quotient (LQ) dengan Model Rasio Pertumbuhan. Dengan analisis ini maka akan dapat diketahui sektor dominan dan potensial baik dari kriteria pertumbuhan maupun kontribusi.

***Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin) I***

Dari hasil overlay tahun 2002-2006 dapat diketahui bahwa kabupaten/kota yang masuk dalam kriteria dominan dan potensial pertumbuhan ada 7 kabupaten /kota dengan sektor andalan yang berbeda-beda. Sektor-sektor tersebut memberikan sumbangan yang dominan baik dalam pertumbuhan maupun kontribusinya.

Pada Bakorlin I terdapat beberapa daerah yang mempunyai sektor dominan dan berkontribusi terhadap PDRB. Kabupaten Rembang mempunyai dominan pertumbuhan dan kontribusi pada sektor pertambangan, bangunan, pengangkutan dan jasa. Kabupaten Pati dan Kota Salatiga pada sektor listrik dan Kota Semarang pada sektor bangunan.

Jika dilihat dari kriteria potensial pertumbuhan dan kontribusi, Kabupaten Rembang mempunyai sektor perdagangan, Pati dengan industri pengolahan dan Kabupaten Kudus, Semarang dan Kendal pada sektor keuangan. Sektor-sektor tersebut penting untuk dikembangkan mengingat masih diperlukannya sektor pendukung selain sektor yang memiliki dominan pertumbuhan.

***Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin) II***

Kondisi yang berbeda di Bakorlin II dibandingkan dengan Bakorlin I dapat dilihat melalui jumlah kabupaten/kota yang memiliki sektor dominan pertumbuhan dan dominan kontribusi. Dari hasil analisis diperoleh informasi bahwa dari 13 kabupaten /kota di Bakorlin II terdapat 5 kabupaten /kota yang memiliki sektor yang dominan terhadap pertumbuhan dan kontribusi. Jumlah daerah yang memiliki dominan pertumbuhan dan dominan kontribusi di Bakorlin II lebih banyak dibandingkan Bakorlin I. Kelima kabupaten /kota tersebut adalah Purworejo, Magelang, Boyolali, Klaten dan Sragen. Jumlah kabupaten/kota yang



mempunyai sektor potensial hanya 1 daerah yaitu Kabupaten Sragen. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan wilayah Bakorlin I yang memiliki lima daerah dengan sektor potensial pertumbuhan dan potensial kontribusi.

Secara rinci sektor-sektor yang memiliki dominan terhadap pertumbuhan dan kontribusi yaitu sektor pengangkutan (Kabupaten Purworejo), sektor bangunan dan sektor jasa (Kabupaten Magelang), sektor listrik (Kabupaten Boyolali), sektor pertambangan dan sektor bangunan (Kabupaten Klaten), serta sektor listrik (Kabupaten Sragen). Adapun sektor yang potensial pertumbuhan dan potensial kontribusi yaitu sektor perdagangan.

### ***Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin) III***

Hampir seluruh wilayah di Bakorlin yang berpusat di Purwokerto ini mempunyai sektor yang masuk kriteria dominan pertumbuhan dan kontribusi. Daerah yang tidak masuk dalam kriteria ini adalah Kabupaten Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara dan Pekalongan. Sektor yang mendominasi hampir seragam yaitu sektor listrik dan pertambangan.

Bakorlin III hanya memiliki 3 (tiga) dari 11 (sebelas) wilayah yang mempunyai potensi pertumbuhan dan kontribusi. Ketiga wilayah tersebut adalah Kabupaten Tegal, Brebes dan Kota Tegal.

### **Analisis Elastisitas dan Multiplier PDRB Terhadap Sektor Ekonomi**

Analisis Elastisitas adalah alat untuk menghitung seberapa elastis perubahan PDRB jika output suatu sektor meningkat. Dengan kata lain analisis ini menghitung kepekaan PDRB terhadap sektor.

### ***Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin) I***

Pada Bakorlin I, sektor pertanian mempunyai nilai elastisitas diatas 1, berarti kenaikan output dengan jumlah yang kecil pada sektor pertanian akan menyebabkan perubahan PDRB dalam persentase yang besar. Kondisi ini hampir sama disetiap kabupaten/kota kecuali Kota Salatiga. Selebihnya nilai elastisitasnya fluktuatif diatas 1, diantaranya Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, dan Demak dimana berturut turut nilainya adalah 1,6 ; 1,03 ; 3,13 ; 1,58 ; 1,04 ; 2,59 ; dan 1,69.

Lebih lanjut, nilai elastisitas diatas 1 juga terdapat pada sektor industri pengolahan, bangunan dan jasa-jasa (Kabupaten Grobogan). Sektor jasa-jasa di Kabupaten Blora mempunyai nilai elastisitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pertaniannya yaitu sebesar 1,43. Pada kabupaten-kabupaten yang lain nilai elastisitas diatas 1 juga disumbangkan oleh sektor listrik, keuangan, perdagangan, keuangan dan pengangkutan dengan potensinya masing – masing.

Secara rata-rata di Bakorlin I, angka multiplier yang tinggi juga diberikan oleh sektor pertanian (6 Kabupaten yaitu Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Jepara, dan Demak). Sektor – sektor selebihnya untuk masing – masing kabupaten/kota nilai multipliernya berfluktuasi antara 0,01 – 0,4.



***Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin) II***

Pada Bakorlin II, dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota setidaknya ada 8 (delapan) kabupaten/kota yang nilai elastisitas PDRB terhadap sektor dimana nilainya diatas 1 disumbangkan oleh sektor pertanian. Di Kabupaten Kebumen, sektor yang mempunyai nilai elastisitas paling tinggi adalah sektor industri pengolahan, listrik, dan perdagangan. Kabupaten Purworejo, sektor pertambangan, listrik, perdagangan, dan jasa-jasa. Sektor pengolahan (1,47), listrik (3,63), pengangkutan (1,04), keuangan (1,13), dan jasa-jasa (1,06) merupakan sektor-sektor yang memberikan kepekaan tinggi terhadap PDRB Kabupaten Wonosobo. Nilai elastisitas diatas 1 di Kabupaten Magelang hanya disumbangkan oleh sektor perdagangan dan keuangan. Selain pertanian, di Boyolali, sektor perdagangan dan keuangan juga mempunyai nilai elastisitas diatas 1. (Keterangan lebih lengkap tiap kabupaten/kota di Bakorlin II ada pada lampiran).

Sektor pertanian mempunyai nilai multiplier yang berbeda beda untuk setiap kabupaten/kota, dimana tertinggi terdapat di Kabupaten Wonogiri, dengan nilai 1,71. Sektor pertambangan nilai multipliernya tertinggi di Kabupaten Kebumen, Purworejo dan Wonogiri dengan nilai 0,03. Nilai multiplier terbesar terdapat di Kabupaten Temanggung dengan nilai 0,93 untuk sektor jasa – jasa.

***Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin) III***

Bakorlin III merupakan wilayah dimana kebanyakan daerahnya berada di Jawa Tengah bagian Barat. Kondisi yang terjadi juga tidak begitu jauh berbeda dengan dua Bakorlin yang lainnya. Pada Bakorlin III, nilai elastisitas sektor pertanian masih cukup mendominasi untuk beberapa wilayah Kabupaten (7 dari 11 Kabupaten) dimana nilai yang paling tinggi yaitu di Kabupaten Pemalang, dengan nilai sampai 5,19. Dari keseluruhan kabupaten/kota, nilai elastisitas PDRB kabupaten/kota terhadap sektor disumbangkan oleh sektor Bangunan di Kabupaten Pekalongan.

Secara umum, nilai multiplier sektor pertanian juga masih mendominasi untuk kebanyakan kabupaten/kota di Bakorlin III. Nilai multiplier tertinggi yaitu 1,51 untuk sektor pertanian di Kabupaten Pemalang. Sedangkan untuk sektor – sektor lainnya nilainya berkisar antara 0 – 0,5.

***Analisis Regresi Sederhana***

Analisis regresi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kontribusi sektor unggulan terhadap ketimpangan pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari Indeks Williamson dan Indikator Kesenjangan Relatif. Secara umum ketimpangan di Jawa Tengah dalam kondisi ketimpangan yang moderat. Hal ini terlihat dari nilai Indeks Williamson yang rata-ratanya sebesar 0,5. Pada Bakorlin I dari tahun 2002 sampai 2006, nilai Indeks Williamson di wilayah tersebut mengalami penurunan walaupun tidak signifikan.

Kondisi yang sama juga terjadi di Bakorlin III, di mana dalam periode tersebut nilai Indeks Williamson mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya. Bahkan pada tahun 2006, nilai Indeks Williamson di Bakorlin III dapat mencapai 0,4. Kondisi yang stagnan terjadi di Bakorlin II selama periode penelitian, di mana nilai Indeks Williamson selama tahun tersebut stabil di angka 0,56. Adapun hasil dari analisis regresi sederhana tersebut dapat disajikan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y_1 = 2,586 - 2,94X_1$$

$$s_e \quad (1,938) \quad (2,911)$$

$$t_{hit} \quad (1,335) \quad (-1,01)$$

$$R^2 = 0,073$$

$$r = -0,27$$

Berdasarkan persamaan diatas, dengan membandingkan antara nilai signifikansi dengan tingkat kesalahan yang diinginkan ( $\alpha = 5\%$ ) maka dapat diketahui bahwa sektor unggulan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pertumbuhan ekonomi. Ini terlihat dari nilai signifikansi sebesar 33,1% yang lebih besar dari nilai  $\alpha = 5\%$ . Nilai  $R^2$  di atas menjelaskan bahwa sebagai variabel dependen, kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB mampu menjelaskan variabel dependen (Indeks Williamson) hanya sebesar 7,3%. Dengan kata lain, 92,7% mampu dijelaskan oleh variabel di luar model. Keeratan hubungan antara ketimpangan pertumbuhan dengan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB tergolong lemah dan memiliki arah yang negatif. Keeratan dan arah hubungan antara dua variabel ini dapat dilihat melalui nilai koefisien korelasi ( $r$ ) yang hanya sebesar -0,27.

Dengan menggunakan kriteria kesenjangan relatif menurut Bank Dunia (2001) dalam Mudrajat Kuncoro (2003), maka ketimpangan di Jawa Tengah selama periode 2002 sampai 2006 tergolong rendah. Ini dapat dilihat dari hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa 40% kabupaten/kota yang berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 % bagian dari pendapatan regional atau PDRB.

Untuk mengetahui pengaruh kontribusi sektor unggulan terhadap ketimpangan pertumbuhan ekonomi yang digambarkan melalui Indikator Kesenjangan Relatif didapatkan hasil perhitungan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,089 + 5,029X \dots\dots\text{Indikator Kesenjangan Relatif untuk Bakorlin I}$$

$$s_e \quad (1,82) \quad (2,678)$$

$$t_{hit} \quad (-0,049) \quad (1,878)$$

$$R^2 = 0,062$$

$$r = 0,25$$

$$\text{sig} = 0,066$$

Pada persamaan (1) di atas dapat diketahui bahwa variabel kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pertumbuhan ekonomi (Indikator Kesenjangan Relatif) pada  $\alpha = 10\%$ , di mana



nilai signifikansi lebih kecil dari  $\alpha = 10\%$ . Apabila variabel kontribusi sektor unggulan berubah sebesar 1% maka variabel ketimpangan akan berubah sebesar 5,029%. Nilai  $R^2$  di atas menggambarkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 6,2% atau sebesar 93,8% dapat dijelaskan oleh variabel di luar model. Keeratan hubungan antara tergolong rendah dan memiliki arah hubungan yang searah. Hal ini terlihat berdasarkan nilai  $r$  sebesar 0,25.

$$Y = 0,037 - 0,0264X_1 \dots\dots\dots \text{Indikator Kesenjangan Relatif untuk Bakorlin II}$$

II

$$s_e \quad (0,004) \quad (0,006)$$

$$t_{hit} \quad (8,859) \quad (-4,325)$$

$$R^2 = 0,222$$

$$r = -0,471$$

$$\text{sig} = 0,343$$

Pengaruh variabel kontribusi sektor unggulan terhadap ketimpangan pertumbuhan ekonomi yang signifikan tidak terjadi di Bakorlin II. Pada persamaan (2) nilai signifikansi menunjukkan angka lebih besar dari pada nilai  $\alpha = 5\%$  atau  $\alpha = 10\%$ . Kemampuan variabel kontribusi sektor unggulan sebagai variabel independen menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 22,2% atau dengan kata lain 77,8% dapat dijelaskan variabel di luar model. Hubungan yang tidak searah dan keeratan hubungan yang tergolong moderat dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai  $r$  yang bernilai sebesar -0,471.

$$Y = 0,042 + 0,171X \dots\dots\dots \text{Indikator Kesenjangan untuk Bakorlin III}$$

$$s_e \quad (0,036) \quad (0,059)$$

$$t_{hit} \quad (1,172) \quad (2,903)$$

$$R^2 = 0,137$$

$$r = 0,37$$

$$\text{sig} = 0,005$$

Pada persamaan (3) dapat dijelaskan bahwa pengaruh variabel kontribusi sektor unggulan terhadap ketimpangan pertumbuhan ekonomi adalah signifikan. Pengaruh yang variabel kontribusi sektor unggulan yang signifikan ini dapat diketahui dengan membandingkan nilai signifikansi dengan tingkat kesalahan yang diinginkan ( $\alpha$ ), di mana nilai signifikansi (0,005) lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$ . Kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen hanya sebesar 13,7% atau dengan kata lain 86,3% dijelaskan oleh variabel di luar model. Keeratan hubungan yang tergolong rendah dan arah hubungan yang positif dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi yang sebesar 0,37.

## G. Kesimpulan

Berdasarkan proses analisis dan perhitungan data di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Mayoritas Kabupaten/Kota di Bakorlin I dan Bakorlin II mempunyai sektor unggulan pada sektor pertanian.
- b. Dominasi sektor pertanian sebagai sektor unggulan tidak terjadi pada Bakorlin III. Wilayah di Bakorlin III sebagian besar ditopang lebih dari tiga sektor unggulan kecuali Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes yang ditopang kurang dari sama dengan dua sektor unggulan. Kondisi yang unik terjadi pada sektor industri pengolahan, di mana tidak ada satupun wilayah kabupaten/kota di Bakorlin III yang memiliki sektor unggulan di sektor ini kecuali Kabupaten Cilacap.
- c. Dengan melihat hasil perhitungan dapat diketahui bahwa semua kabupaten/kota di Bakorlin I mempunyai kontribusi positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto, sebagian besar wilayah di Bakorlin I memiliki nilai *proportional share* yang positif kecuali Kabupaten Kudus, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kota Semarang, dan seluruh wilayah di Bakorlin I tidak memiliki keuntungan lokasional yang disebabkan oleh tidak memiliki sumber daya yang melimpah/efisien.
- d. Kontribusi yang positif terhadap PDRB juga dimiliki oleh kabupaten/kota di Bakorlin II. Spesialisasi pada sektor yang secara nasional tumbuh cepat ditunjukkan oleh sebagian besar kabupaten/kota di Bakorlin II dan tidak ada satupun wilayah di Bakorlin II yang tidak mempunyai keuntungan lokasional.
- e. Untuk wilayah Bakorlin III, hasil dari analisis *shift share* secara umum tidak jauh berbeda dengan dua wilayah Bakorlin sebelumnya. Kesamaan kondisi umum tergambarkan pada nilai NS yang positif, sebagian besar berspesialisasi pada sektor-sektor yang secara nasional tumbuh dengan cepat dan seluruh daerah tidak memiliki keuntungan lokasional seperti di Bakorlin I dan Bakorlin II juga terjadi di bakorlin III.
- f. Berdasarkan Model Rasio Pertumbuhan (MRP), pada Bakorlin I sektor yang masuk kedalam kriteria potensial adalah sektor keuangan, perdagangan, hotel, industri pengolahan dan pengangkutan. Pada Bakorlin II dan III, sektor yang potensial yaitu industri pengolahan, keuangan dan perdagangan. Dalam tataran praktis, menginterpretasi hasil analisis ini harus hati-hati karena harus memahami karakteristik masing-masing sektor.
- g. Dari hasil analisis overlay, Sektor perdagangan, industri pengolahan, dan keuangan merupakan sektor yang potensial dalam pertumbuhan dan kontribusi pada Bakorlin I. Pada Bakorlin II hanya ada satu yaitu sektor perdagangan, dan Bakorlin III mempunyai sektor industri pengolahan dan keuangan.
- h. Secara umum ketimpangan di Jawa Tengah dalam kondisi ketimpangan yang moderat. Hal ini terlihat dari nilai Indeks Williamson yang rata-rata sebesar 0.5.
- i. Sektor unggulan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan Indeks Williamson.



- j. Dengan menggunakan kriteria kesenjangan relatif menurut Bank Dunia, ketimpangan di Jawa Tengah selama periode 2002 sampai 2006 tergolong rendah. Ini dapat dilihat dari 40% kabupaten/kota yang berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 % bagian dari pendapatan regional atau PDRB.
- k. Berdasarkan hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa di Bakorlin I variabel kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pertumbuhan ekonomi (Indikator Kesenjangan Relatif) pada  $\alpha = 10\%$ ,
- l. Pengaruh variabel kontribusi sektor unggulan terhadap ketimpangan pertumbuhan ekonomi yang signifikan tidak terjadi di Bakorlin II. Kemampuan variabel kontribusi sektor unggulan sebagai variabel independen menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 22,2% dan nilai  $r$  (koefisien korelasi) sebesar -0,471.
- m. Di Bakorlin III, pengaruh variabel kontribusi sektor unggulan terhadap ketimpangan pertumbuhan ekonomi adalah signifikan. Kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen hanya sebesar 13,7%, keeratan hubungan tergolong rendah serta memiliki arah hubungan yang positif ( $r = 0,37$ ).

#### H. Saran

Melalui kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka saran yang dapat disampaikan antara lain:

- a. Dalam rangka melakukan pembangunan daerah yang berkelanjutan, pemerintah perlu mengoptimalkan pembangunan pada sektor unggulan dan memiliki rasio pertumbuhan yang dominan yang disertai dengan nilai multiplier terhadap perekonomian yang signifikan.
- b. Ketimpangan daerah yang tergolong moderat, menunjukkan masih perlu adanya campur tangan pemerintah pusat dalam hal memfasilitasi koordinasi antar daerah dan antar Bakorlin agar pembangunan dapat berkesinambungan antara satu daerah dengan daerah lainnya.
- c. Keterlibatan masyarakat dan peran swasta ke dalam pembangunan perlu dilakukan mengingat keberadaan kedua pelaku tersebut yang seyogyanya mampu mendukung dan ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
- d. Hasil penelitian yang masih bersifat teoritis ini masih perlu dipadukan dengan analisa para ahli yang menguasai kondisi lapangan dari masing-masing daerah agar didapatkan suatu kebijakan yang sesuai dan terbaik bagi pembangunan di daerah tersebut.

#### I. Daftar Pustaka

Anonimous. 2006. **Salatiga Memiliki Sektor Unggulan**. Semarang : Suara Merdeka 29 Nopember 2006.

- Bilas, Richard A. 1992. **Ekonomi Mikro** terjemahan Drs. Sahat Simamora. Jakarta : Rineka Cipta.
- Boediono. 1995. Teori **Pertumbuhan Ekonomi**. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu **Ekonomi No. 4**. Yogyakarta : BPFE UGM.
- BPS. 2007. **PDRB Jawa Tengah Tahun 2006**.
- BPS. 2007. **PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2002-2006**.
- Glasson, John. 1990. **Pengantar Perencanaan Regional** (Edisi Terjemahan). Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hendra Esmara. 1975. Regional Income Disparitas. **Bulletin of Indonesian Economic Studies**, Vol.11 No.1 March.
- Hastarini Dwi Atmanti. 2002. **Analisi Efisiensi dan Keunggulan Kompetitif Sub Sektor Industri Manufaktur Di Jawa Tengah Sebelum dan Selama Krisis**. Tesis MIESP FE UNDIP. (tidak dipublikasikan)
- Hermawan Wasito. 1995. **Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa**. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Irawan dan Suparmoko. 1992. **Ekonomika Pembangunan**. Edisi Keenam. Yogyakarta : BPFE UGM.
- Isard, W. 1972. **Methods of Regional Analysis : An Introduction to Regional Science**. London : The MIT Press.
- Maulana Yusuf. 1999. **Model Rasio Pertumbuhan (MRP) sebagai Salah Satu Alat Analiss Alternatif dalam Perencanaan Wilayah dan Kota. Aplikasi Model : Wilayah Bangka-Belitung**. Jakarta : Ekonomi dan Keuangan Indonesia Volume XLVII Nomor 2, 1999.
- Muana Nanga. 2001. **Makroekonomi Teori, Masalah dan Kebijakan**. Jakarta : Rajawali Press.
- Mudrajad Kuncoro. 2003. **Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan**. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Nasyid Majidi. 1991. **Desentralisasi Klasifikasi Daerah Untuk Alokasi Subsidi**. Prisma No. 8 Tahun XX. Jakarta.
- Nyoman Rudana. 2007. **Analisa LQ di Propinsi Bali untuk Menentukan Sektor Ekonomi Unggulan**. Available at : <http://www.scribd.com>.
- Rachmad Hendayana. 2007. **Aplikasi Metode Loqation Quotient (LQ) Dalam Penentuan Komoditas Unggulan Nasional**. Available at : [google.com](http://google.com).
- Robinson Tarigan. 2005. **Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi**. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sadono Sukirno. 1985. **Ekonomi Pembangunan**. Jakarta : LP3ES.



- Sartini. 2007. **Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi**. Available at : [http : //www.google.com](http://www.google.com).
- Todaro, Michael P. 1993. **Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga**. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Tulus Tambunan. 2001. **Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris**. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Wiloejo Wirjo Wijono. 2006. **Mengungkap Sumber-sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dalam Lima Tahun Terakhir**. Jurnal Manajemen dan Fiskal. Volume V, Nomor 2. Jakarta.
- Yoenanto Sinung Noegroho. 2007. **Analisis Disparitas Pendapatan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Regional**. (Disampaikan pada Seminar : Urban and Regional, 13 Desember 2007 di Wisma Makara Kampus UI-Depok). Available at : [http : //www.google.com](http://www.google.com).